

## **Implementasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Dengan Prinsip “Holding” RSUD di Provinsi DKI Jakarta Dalam Konteks SIMRS**

### ***Implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 With the "Holding" Principle of RSUD in DKI Jakarta Province From The Aspect of Hospital Information System***

Achmad D Putranto<sup>1</sup> Laksono Trisnantoro<sup>2</sup> Guardian Y Sanjaya<sup>2</sup>

#### **INTISARI**

Dengan adanya kemajuan penggunaan teknologi informasi dan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setiap rumah sakit dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Terbitnya PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, memposisikan RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Jejaring Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dibawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi untuk menunjang kinerja pelayanan agar lebih lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem informasi Jejaring RSUD di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam segi fungsionalitas, pengorganisasian serta peran Dinas Kesehatan dalam memperkuat implementasi SIMRS di RSUD. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah 1 orang koordinator IT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 1 orang pengelola IT di RSUD Kelas B dan 1 orang pengelola IT di RSUD Kelas D, 1 orang pengguna SIMRS di RSUD Kelas B dan D, serta 1 orang pihak manajemen RSUD Kelas B dan D. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara serta telaah dokumen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fungsionalitas SIMRS di RSUD kelas A dan B beragam, sementara untuk 19 RSUD Kelas D memiliki fungsionalitas yang sama dikarenakan dikembangkan sendiri oleh Tim IT yang difasilitasi Dinkes. Semua modul SIMRS dan *dashboard* EIS masih bersifat *front office*. Pengorganisasian dari di RSUD Kelas A, B dan D serta Dinkes berada dibawah Bagian Keuangan, Kasubbag Tata Usaha dan Bidang Perencanaan Pembiayaan. Peran Dinkes sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengintegrasian RSUD /RSKD. Implementasi SIMRS jejaring RSUD dibawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan baik namun masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dinkes harus lebih optimal dalam pemanfaatan data *Dashboard* EIS untuk berperan sebagai induk organisasi dari *Holding* RSUD yang melakukan pembinaan kepada RSUD.

Kata kunci : SIMRS, jejaring, RSUD, Dinas Kesehatan

---

1 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

2 Fakultas Kedokteran UGM

***Implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 With the "Holding"  
Principle of RSUD in DKI Jakarta Province From The Aspect of Hospital  
Information System***

**Implementasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Dengan Prinsip  
"Holding" RSUD di Provinsi DKI Jakarta Dalam Konteks SIMRS**

Achmad D Putranto<sup>3</sup> Laksono Trisnantoro<sup>4</sup> Guardian Y Sanjaya<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

With the progress of the use of information technology and the enactment of the National Health Insurance (JKN). Each hospital is required to work effectively and efficiently. Publication of PP no. 18 of 2016 About Regional Devices, positioning RSUD as Technical Implementation Unit (UPT) under the coordination of Health Office. The network of Regional General Hospital (RSUD) under Health Office (Dinkes) of DKI Jakarta Province already has an integrated Hospital Management Information System to support the service performance to be more effective and efficient. This study aims to find out how the management of information systems Network RSUD under Health Office of DKI Jakarta Province in terms of functionality, organizing and the role of Health Office in strengthening SIMRS implementation in RSUD. This type of research is case study with qualitative approach. The sample in this research is 1 person of IT Coordinator of DKI Jakarta Provincial Health Office, 1 IT manager in RS B Class and 1 IT manager in RS D Class, 1 SIMRS(HIS) user in RSUD B and D, and 1 person management of RSUD Class B and D. Research is done by observation and interview and document review. The results showed that SIMRS functionality in class A and B hospitals varied, while for 19 RSUD D had the same functionality because it was developed by IT team facilitated by Health Office. All HIS modules and the EIS dashboard are still front office. The organization of the RSUD Class A, B and D and Dinkes is under the Finance Section, Head of Sub Division and Planning of Financing. The role of Health Office in accordance with Governor Regulation No. 65 of 2016 on Management of Integration of RSUD / RSKD. Implementation of RSUD SIMRS network under DKI Jakarta Provincial Health Office has been running well but still needs further development. Dinkes should be more optimal in the utilization of Dashboard EIS data to serve as the holding organization of Holding RSUD conducting guidance to RSUD.

Keywords: SIMRS, network, RSUD, Health Office

---

1 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
2 Fakultas Kedokteran UGM